

MENJAGA ETIKA DALAM BERPOLITIK

Budiyono*

Abstrak

Reformasi sebagai upaya penataan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih demokratis, menghargai Hak Azasi Manusia, dalam suasana kehidupan masyarakat yang beradab, yang telah berjalan satu dasawarsa lebih, ternyata masih banyak menyisakan persoalan, diantaranya dalam bidang politik misalnya, politik dimaknai hanya sekedar berburu kekuasaan dengan menghalalkan segala cara tanpa mengindahkan etika dan moral. Pada hal sejatinya politik pada awalnya merupakan kegiatan warganegara untuk membicarakan kebaikan bersama atau kepentingan publik yang dilandasi oleh nilai-nilai moral. Berpolitik merupakan sebuah aktifitas pengabdian politik yang berpijak pada kehendak umum demi kesejahteraan masyarakat dan mengesampingkan kepentingan kelompok dan individu. Dengan berpolitik secara elegan akan menumbuhkan kedewasaan dan kematangan demokrasi. Aktor politik yang memilih politik sebagai medan perjuangan dan pengabdian harus senantiasa menegakkan etika politik demi terwujudnya kehidupan berbangsa-negara yang bermartabat dengan memelihara dan mengembangkan perilaku politik yang cerdas, bersih, toleran, santun, menghargai kemanusiaan demi kesejahteraan bangsa. Oleh karena itu dalam berperilaku politik perlu bimbingan atau acuan nilai-nilai moral yang bersumber dari ideologi bangsa, Pancasila, agar kehidupan politik lebih cerdas dan bermartabat.

Kata kunci : *Etika, Politik, Bermartabat*

*) Dosen Prodi PPKn FPIPS IKIP PGRI Madiun

Pendahuluan

Era reformasi yang berbasis sistem politik demokrasi, terbuka kesempatan yang seluas luasnya bagi warganegara termasuk para elit politik yaitu individu-individu terbaik yang berhasil dan mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat, untuk mengekspresikan gagasan-gagasan, pendapat dan tindakan secara bebas dalam segala aspek kehidupan. Kebebasan sebagai salah satu dimensi demokrasi mendapat sambutan yang sangat antusias dalam masyarakat yang sedang mengalami transisi demokrasi yang terkadang cenderung kebablasan. Euforia kebebasan yang berlebihan dalam bidang politik misalnya membuat wajah politik Indonesia terasa semakin karut marut. Padahal sejatinya reformasi adalah ijtihad politik bangsa untuk mengadakan perubahan-perubahan dan penataan kelembagaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menuju Indonesia yang lebih baik, sesuai dengan perkembangan zaman yang penuh tantangan yang semakin berat dalam dunia yang semakin mengglobal.

Karut marutnya perpolitikan di negeri ini karena “politik” dimaknai oleh para aktor politik (pimpinan politik, aktivis politik, individu warganegara biasa) hanya sekedar berburu kekuasaan dengan menghalalkan segala cara, termasuk menggunakan *money politic* tanpa

mengindahkan etika dan moral sehingga menimbulkan kekacauan politik, bentrokan horizontal dan vertikal, anarkisme, ramai dengan politik transaksional, penyalahgunaan wewenang, korupsi menjalar ke berbagai cabang kekuasaan negara, seperti, Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, Mahkamah Konstitusi, dan Pemerintah Daerah. Para elit politik (pejabat negara dan pemerintah dalam arti luas) yang seharusnya menjadi tauladan dalam mewujudkan *good governance*, namun diantara mereka tidak sedikit yang terbelit dengan persoalan korupsi. Beberapa contoh korupsi yang melibatkan elit politik dapat dikemukakan diantaranya kasus cek pelawat pemilihan Deputy Gubernur BI, kasus Nazarudin, mafia badan anggaran DPR, kasus di Kemenakertrans, kasus wisma atlet Sesmenpora, Surat palsu Mahkamah Konstitusi, 17 Gubernur dan 140 Bupati dan Walikota tersangkut pidana korupsi, dan masih banyak lagi yang belum terungkap. Demikian juga Partai politik yang seharusnya menjadi pilar bagi tegaknya demokrasi, ternyata tidak sedikit yang menjadi penghambat jalannya demokrasi.

Beberapa Kasus tersebut menandakan bahwa dekadensi moral tengah melanda ke berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Reformasi yang diharapkan membawa keadilan, kebenaran, damai, sejahtera,

ternyata melenceng dan amburadul. Pelanggaran etika dan kepatutan sering kali dipertontonkan oleh para elit politik dalam perilaku politiknya, yang seharusnya mereka memperjuangkan kepentingan rakyat, namun dalam realitanya lebih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Dilain pihak peran serta rakyat dalam proses pengambilan keputusan sering kali diabaikan sehingga dapat menimbulkan sikap apatisisme publik dan rendahnya derajat legitimasi dari setiap keputusan yang diambil sehingga dapat memicu munculnya konflik di masyarakat.

Oleh karena itu bila perilaku politik tersebut tidak berubah dan tanpa bimbingan moralitas, akan sangat membahayakan kehidupan bermasyarakat, bangsa dan negara. Banyak negara mengalami kegagalan dikarenakan rusaknya moral para penyelenggara negara dan masyarakat. Tulisan ini akan membahas perilaku politik dari perspektif etika politik. Sebab perilaku politik tanpa bimbingan moral tidak mencerminkan karakter politisi sejati yang cerdas, rela berkorban, dan senantiasa mengutamakan kepentingan publik.

Politik Kepentingan Publik

Istilah politik mengandung arti dan makna yang beragam tergantung dari perspektif dalam memahami pengertian

politik. Semenjak awal perkembangan politik hingga terakhir, pada dasarnya politik dapat dilihat dari lima sudut pandang yang dapat melahirkan konsep-konsep politik. Pertama politik sebagai usaha-usaha untuk kebaikan bersama, Kedua politik berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Ketiga politik adalah kegiatan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan. Keempat politik merupakan kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. Kelima politik adalah konflik dalam rangka mencari dan mempertahankan sumber sumber yang dianggap penting.

Surbakti (1999) menjelaskan secara luas mengenai makna dan arti politik. Politik dari pandangan klasik sebagaimana yang dikemukakan oleh Aristoteles adalah suatu asosiasi warganegara yang berfungsi membicarakan dan menyelenggarakan hal ihwal yang menyangkut kebaikan bersama seluruh anggota masyarakat. Urusan-urusan yang menyangkut kebaikan bersama (kepentingan publik) akan dibicarakan dan diperdebatkan dan tindakan-tindakan untuk mewujudkan kebaikan bersama akan diambil dan ini memiliki nilai moral yang lebih tinggi. Kepentingan umum itu meliputi antara lain keadilan, kebajikan, kebenaran, kebahagiaan dan sebagainya.

Dari perspektif kekuasaan, politik dapat dimaknai kegiatan mencari dan

mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Robson yang mengembangkan pandangan ini mendefinisikan politik adalah sebagai ilmu yang memusatkan perhatian pada perjuangan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan, mempengaruhi pihak lain, ataupun menentang pelaksanaan kekuasaan. Kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi.

Sedangkan dari pandangan fungsional, politik dapat dimaknai sebagai kegiatan para elit politik merumuskan dan melaksanakan kebijakan umum. David Easton dan Harold Lasswell merumuskan politik *the authoritative allocation of values for a society* atau alokasi nilai-nilai secara otoritatif, berdasarkan kewenangan dan karena itu mengikat untuk suatu masyarakat. Laswell menyimpulkan politik adalah *who gets what, when, how* atau siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana. Mendapat apa artinya mendapat nilai-nilai. Kapan berarti ukuran pengaruh yang digunakan untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan nilai-nilai terbanyak, bagaimana berarti dengan cara apa seseorang mendapatkan nilai-nilai. Nilai adalah sesuatu yang diinginkan manusia bersifat abstrak seperti keadilan, keamanan, kebenaran, kebebasan, persamaan, demokrasi,

kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kehormatan, nasionalisme, kesejahteraan. Disamping itu ada nilai-nilai yang bersifat konkret seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan.

Politik dapat diartikan juga konflik yaitu perbedaan pendapat, persaingan bahkan pertentangan dan perebutan dalam upaya mendapatkan atau mempertahankan nilai-nilai. Politik merupakan gejala yang serba hadir dalam masyarakat termasuk dalam proses politik. Konflik dapat diselesaikan melalui proses dialog sehingga pada suatu konsensus maupun diselesaikan lewat kesepakatan dalam bentuk keputusan politik yang merupakan pembagian dan penjabatan nilai-nilai, oleh karena itu keputusan politik merupakan upaya penyelesaian konflik politik.

Pandangan kelembagaan melihat politik sebagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Dalam hal ini Max Weber merumuskan negara sebagai komunitas manusia secara sukses memonopoli penggunaan kekuasaan fisik yang sah dalam wilayah tertentu. Negara dipandang sebagai sumber utama hak untuk menggunakan paksaan fisik yang sah. Oleh karena itu politik bagi Weber merupakan persaingan untuk membagi kekuasaan atau persaingan untuk mempengaruhi pembagian kekuasaan antar negara maupun antara kelompok didalam suatu negara.

Berdasarkan pemikiran-pemikiran politik, yang telah dikemukakan oleh para pakar dibidang politik, bila dicermati secara runtut dan mendalam, sebenarnya kehidupan manusia tidak terlepas dari politik. Dari beberapa konsep politik tersebut, ada yang menarik dan seharusnya menjadi perhatian bersama yaitu pengertian politik yang dikemukakan oleh Aristoteles. Pada awal perkembangannya, politik diartikan dan dimaknai sebagai usaha untuk kebaikan bersama seluruh anggota masyarakat dan publik menjadi ajang penerapan segala tindakan baik itu. Kebaikan bersama itu merupakan tujuan-tujuan moral atau nilai-nilai ideal yang bersifat abstrak seperti keadilan, kebajikan, kebenaran, kebahagiaan, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Disamping itu kebaikan bersama disama-artikan dengan kepentingan umum, yaitu sebagai keinginan orang banyak (*general will*), bukan keinginan banyak orang atau kumpulan keinginan banyak orang (*will of all*), disini politik dianggap para ilmuwan sebagai kumpulan nilai kebaikan sekaligus kebenaran yang seharusnya. Politik dalam konsep ini melahirkan konsep politik “high –politic”.

Politik tinggi tidak semata mata berburu kekuasaan, apalagi dengan menghalalkan segala cara seperti melakukan kecurangan, penipuan, suap, dusta, intimidasi, *money politics* dan lain

sebagainya. Politik tinggi senantiasa harus mengedepankan moral, etika, ketauladanan, bertanggungjawab dalam politik, mengutamakan kepentingan rakyat sebagai tugas mulia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum.

Pengertian politik diatas sebenarnya memiliki makna yang mulia, namun masih banyak para politisi yang kurang memahami hakekatnya sehingga tidak sedikit kebijakan publik yang ditelurkan mendapat kritik tajam dari masyarakat. Contoh terakhir dibatalkannya rencana pembangunan gedung DPR yang super mewah yang menelan biaya trilyunan, ditengah kondisi bangsa yang banyak dirundung permasalahan seperti masih besarnya angka kemiskinan, pengangguran, kesenjangan sosial, gizi buruk, dan sebagainya. Maka dari itu agar para elit politik lebih memiliki kepekaan yang tinggi terhadap problematika sosial sehingga kebijakan publik yang mereka telurkan spiritnya untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam sistim politik demokrasi, suaranya harus diakomodasi, dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan publik. Demokrasi dalam arti yang sederhana adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu pemerintahan yang demokratis apabila kekuasaan negara berada ditangan rakyat dan segala tindakan

negara ditentukan oleh kehendak rakyat. Hal ini memerlukan kecerdasan dan seni untuk mencapai tujuan kebaikan bersama yang dilakukan dengan penuh kesantunan. Dengan demikian berpolitik merupakan sebuah kerja politik yang berpijak pada kehendak umum demi kesejahteraan umat dan mendegradasi kepentingan kelompok dan individu. Hanya dengan berpolitik yang demikian kedewasaan demokrasi akan terjadi yang pada gilirannya dapat menumbuhkan kematangan demokrasi. Agar pemerintahan demokratis dapat diwujudkan, menurut Budiardjo (2002), diperlukan persyaratan-persyaratan antara lain : 1. Perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi selain dari menjamin hak hak individu harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak hak yang dijamin. 2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, pemilihan umum yang bebas, 3. Kebebasan untuk menyatakan pendapat, 4. Kebebasan untuk berorganisasi atau berserikat dan beroposisi, 5. Pendidikan kewarganegaraan.

Etika Politik Demi Kebermartabatan

Etika dan moral memiliki hubungan yang sangat erat dan sering kali disamakan, pada hal memiliki makna yang berbeda. Moral yaitu merupakan suatu ajaran-ajaran atau wejangan-wejangan, patokan-patokan, kumpulan peraturan baik lisan maupun tertulis tentang bagaimana manusia harus

hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang baik. Adapun etika adalah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia. Sebelum membahas etika politik, terlebih dahulu memahami tentang etika dan moral, yang dikemukakan oleh para ilmuwan.

Menurut Abdullah (dalam Rahmadiyah 2010) etika adalah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai buruk dengan memperlihatkan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat dicerna akal pikiran. Sedangkan I Gede AB Wiranata etika merupakan refleksi manusia tentang apa yang dilakukan dan dikerjakannya. Etika adalah wahana orientasi bagi usaha manusia untuk menjawab suatu pertanyaan yang amat fundamental. Etika sering disebut filsafat moral. Etika membantu manusia menyulahi kesadaran moralnya dan turut serta mencari pemecahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Etika juga dapat membantu untuk mencari alasan mengapa suatu perbuatan harus dilakukan atau sebaliknya untuk tidak dilakukan.

Sedangkan moral, sebagaimana dikemukakan Here (dalam Darmadi 2009) pada dasarnya bersifat *perscriptive, directive, imperative, and commanding* (*derived from same rule or principle of*

action) serta *obligue*. Bila kesemua moral itu menjadi “ketetapan perbuatan” (*prescribed action*) maka akan menjadi *duty and obligation* (tugas dan kewajiban) atau kewajiban tanggung jawab moral (*moral obligation/responsibility*).

Ronald durka (dalam Darmadi 2009) mengemukakan ciri-ciri orang yang matang secara moral (*morally mature person*) yakni :

1. *Who holds correct moral position and acts in accord with such position.*
2. *The knowledge of these do's and dont's right and rong.*
3. *The character or will to act in accord with sub 2.*
4. *Know best what would or should*
5. *Mature moral reason*

Dalam kaitan moral ini kita tampilkan moralita pada jabatan profesional sebagaimana diutarakan oleh Joseph A. Racline(1985) yakni :

1. *Expertise* memiliki keahlian khusus
2. *Autonomy* kemandirian dalam pelaksanaan dan penentuan sesuatu
3. *Commitment* terhadap sub 1.
4. *Identification* didalam/masyarakat/organisasi.
5. *Ethict* keterkaitan dengan moralitas hidup.

6. *Standadized* dalam pola kerja atau pola pikir memiliki tata aturan khusus.

Dari beberapa teori yang berkaitan dengan etika dan moral yang telah dipaparkan oleh para pakar tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa etika berupaya menyadarkan warganegara tentang apa yang seharusnya terjadi, bukan yang sebenarnya akan atau telah terjadi, bahwa segala tindakan itu sesuai atau tidak dengan nilai-nilai moral.

Bila kita cermati paparan tentang etika dan moral diatas, ternyata etika dan moral senantiasa melekat pada manusia yang berkeluhuran berkaitan dengan profesi yang disandangnya. Oleh karena itu aktor politik yang memilih politik sebagai lapangan perjuangannya harus menegakkan etika politik demi terwujudnya kehidupan berbangsa-negara yang bermartabat dengan memelihara dan mengembangkan perilaku politik yang cerdas, bersih, toleran, santun, menghargai kemanusiaan demi kesejahteraan umat.

Hal tersebut ditegaskan oleh Suseno (dalam Kaelan 2008) bahwa etika politik tetap meletakkan dasar fundamental manusia sebagai manusia, dasar ini lebih meneguhkan akar etika politik bahwa kebaikan senantiasa didasarkan kepada hakikat manusia sebagai makhluk yang beradab dan berbudaya. Oleh

karena itu aktualisasi etika politik harus senantiasa mendasarkan kepada ukuran harkat dan martabat manusia sebagai manusia.

Dalam FGD Kemdagri, Yudi Latif (1/10/10) mengemukakan landasan moral bagi kehidupan politik yang bermoralitas ketuhanan, “Ketuhanan dalam kerangka Pancasila mencerminkan komitmen etis bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kehidupan publik-politik berlandaskan nilai-nilai moralitas dan budi pekerti yang luhur...” Jadi sebagai acuan etika dalam berpolitik adalah nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika politik.

Lebih lanjut makna etika dalam politik Indonesia disampaikan oleh Noor Syam (Media Indonesia 1/10/10) mengatakan ajaran dan nilai filsafat amat mempengaruhi pikiran, budaya, dan peradaban serta moral manusia. Semua sistem kenegaraan ditegakkan berdasarkan ajaran atau sistem filsafat yang mereka anut (sebagai dasar negara, ideologi negara)... berbagai negara modern mempromosikan keunggulan masing masing dan terus memperjuangkan supremasi ideologi dan dominasi sistem kenegaraanya : theokratisme, liberalisme, kapitalisme, marxisme, komunisme, atheisme...bangsa Indonesia menegakkan sistem kenegaraan Pancasila, UUD Proklamasi 1945, sebagai aktualisasi filsafat hidup yang diamanatkan

oleh panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagai pendiri negara. Sepanjang sejarah bangsa ini kita dijiwai nilai nilai dan moral Pancasila.

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia merupakan suatu dasar nilai dan norma untuk mengatur pemerintahan negara, memberikan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai tersebut akan dijabarkan dalam kehidupan bersifat praksis dalam masyarakat, bangsa dan negara maka nilai-nilai tersebut kemudian dijabarkan dalam suatu norma-norma yang jelas sehingga menjadi pedoman. Norma-norma tersebut meliputi (1) norma moral yaitu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut baik maupun buruk, sopan atau tidak sopan, susila atau tidak susila. (2) norma hukum yaitu suatu sistem peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, etika politik, menurut Suseno (dalam kaelan 2008) menuntut agar kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai dengan :

1. Asas legalitas (legitimasi hukum) yaitu dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Diasahkan dan dijalankan secara demokratis (legitimasi demokrasi).
3. Dilaksanakan berdasarkan prinsip prinsip moral atau tidak bertentangan dengannya (legitimasi moral)

Demi terwujudnya etika dalam berpolitik diperlukan kesadaran semua warganegara terutama para elit untuk senantiasa menghadirkan moral dalam perilaku politiknya sehingga segala tindakannya diorientasikan kepada kepentingan publik dan menghormati kemanusiaan untuk kesejahteraan umat. Etika politik yang telah terinternalisasi dalam diri para politisi dapat mencegah terjadinya distorsi dalam praktek penyelenggaraan negara sehingga kebijakan-kebijakan yang dirumuskan dan diimplementasikan mendapat dukungan dari rakyat atau legitimate. Nilai-nilai moralitas itu terkristal luhur dalam Pancasila yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pola pikir dan bertindak. Komitmen yang serius oleh semua elemen masyarakat untuk menegakkan moralitas memberikan harapan, bahwa masyarakat yang beradab, adil, demokratis menghormati kemanusiaan dan sejahtera akan tercapai sesuai dengan amanat konstitusi.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas bahwasannya aktor politik atau politisi

sejati adalah orang yang terpanggil untuk berpolitik. Berpolitik merupakan sebuah aktifitas pengaduan politik yang berpijak pada kehendak umum demi kesejahteraan bangsa dan mendegradasi kepentingan kelompok dan individu. Hanya dengan berpolitik yang demikian kedewasaan demokrasi akan terjadi yang pada gilirannya dapat menumbuhkan kematangan demokrasi.

Dalam menjalankan aktivitas politiknya politisi sejati senantiasa mendasarkan pada etika dan moral, sebuah bangsa itu tegak karena moral. Sebaliknya jika rusak moral suatu bangsa maka rusaklah bangsa itu. Maka politik yang tidak didasarkan etika dan moral adalah awal dari bencana dan kehancuran. Ditengah euforia kebebasan transisi demokrasi, para politisi yang seharusnya mengemukakan gagasan atau ide yang cemerlang sebagai solusi permasalahan bangsa yang strategis, malahan sering kali mempertontonkan perilaku yang kurang patut atau kurang pantas. Misalnya “perburuan rente” yang banyak menyeret mereka dalam tindak pidana korupsi, menyusun program kerja atau membuat kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat (rencana pembangunan gedung parlemen yang sangat mewah, misalnya). Fenomena tersebut sekilas tidak melanggar ketentuan apapun, tergantung dari perspektif mana melihatnya. Bangsa yang memiliki peradaban tinggi

melihat hal tersebut diatas tak etis, tetapi bagi bangsa peradabannya belum maju, melihat tak ada pelanggaran etik karena mereka kurangnya empati atas penderitaan rakyat dan hilangnya akal budi. Oleh karena itu etika politik sangat penting dalam berpolitik demi terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermartabat.

Kesemuanya merupakan tantangan bagi semua warganegara dan elit politik pada khususnya secara bersama menghadirkan etika dan moral dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam berpolitik.

Etika politik yang tertanam kuat dalam setiap warga negara dan menjadi panduan, membuat warga tidak sekedar hidup, melainkan hidup dengan bijak, menghormati kemanusiaan. Dengan hadirnya nilai-nilai Pancasila dalam politik maka politik menjadi lebih bermoral dan nilai-nilai Pancasila adalah kekuatan moral, etika dalam berbangsa dan bernegara demi terwujudnya kesejahteraan bangsa Indonesia.

Daftar Pustaka

- Hamid Darmadi, 2009, *Dasar Konsep Pendidikan Moral*, Alfabeta, Bandung
- Istighfarotur Rahmadiyah, 2010, *Pendidikan Etika*, UIN Maliki Press, Malang
- Kaelan, 2008, *Pendidikan Pancasila, Paradigma*, Yogyakarta
- Miriam Budiardjo, 2002, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Mulyawan Karim, 2010, *Rindu Pancasila*, Kompas Media Nusantara, Jakarta
- Nurcholish Madjid (et,al),2000, *Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern*, Mediacita, Jakarta
- Ramlan Surbakti, 1999, *Memahami Ilmu politik*, Grasindo, Jakarta
- Selo Soemardjan (ed), 2000, *Menuju Tata Indonesia Baru*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Ubaedilah & Abdul Rozak (ed),2008, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education)*, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta
- Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia, Jakarta